

Peran LKM-Kube Sejahtera 14 dalam Pemberdayaan Masyarakat ***The Role of LKM-Kube Sejahtera 14 on Community Empowerment***

Kissumi Diyanayati dan Suryani

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS),
diyanasasongko@yahoo.com,
yanthi_ys@yahoo.com>. Diterima 12 Maret 2014, direvisi 11 April 2014, disetujui 5 Mei 2014.

Abstract

The research on the role of LKM-Kube Sejahtera 14 on community empowerment is done in Gunungkidul Regency, Yogyakarta Special Territory. The research method is qualitative-descriptive with 22 Respondents as data resources from 10 LKM-Kube and Kube. Data are gathered through interview, observation, and documentary analysis. Data are analysed in qualitative technique through Mile and Huberman model. The result shows that LKM-Kube is able to hold the role as mediating institution between government (Social Agency) and community (Kube members), also among the members of the community its self. LKM-Kube Sejahtera 14 are able to hold its function as complemented institution that run funding activities where the government has not done yet intensively in saving and credit development for its members. The institution is also able to hold its function as subsidiary institution, as a partner that support community empowerment designed by government, especially rural poor community through Kube. Members of Kube are able to improve their social welfare, in case of their income, ability to send their children to school, get access to health service, and renovate their houses. the success of LKM Kube Sejahtera 14 still need to be enhanced with related government agencies guidance.

Keywords:

Mediating Institution-Community Empowerment-LKM-Kube

Abstrak

Penelitian tentang peran lembaga mediasi dalam pemberdayaan masyarakat di lakukan pada LKM-Kube Sejahtera 14 Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, DIY. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan sumber data sebanyak 22 orang yang berasal dari pengurus 10 Kube dan LKM-Kube. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan, LKM-Kube mampu berperan sebagai lembaga mediasi antara pemerintah (Dinas Sosial) dengan masyarakat (anggota Kube), dan antar masyarakat sendiri (mampu dengan tidak mampu). LKM-Kube Sejahtera 14 mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga komplementer bergerak dalam kegiatan pengembangan keuangan yang tidak atau belum digarap secara intensif oleh pemerintah dalam bentuk tabungan masyarakat dan pemberian pinjaman bagi anggota. Lembaga ini juga mampu menjalankan fungsi sebagai lembaga subsider, yakni berperan sebagai mitra yang mendukung dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai program yang dirancang pemerintah, terutama pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan melalui kelompok usaha bersama (Kube). Anggota Kube mampu meningkatkan kesejahteraan sosialnya, dilihat dari peningkatan pendapatan, kemampuan menyekolahkan anak, kemampuan mengakses layanan kesehatan, dan kemampuan merenovasi rumah tinggalnya. Keberhasilan LKM-Kube Sejahtera 14 masih perlu ditingkatkan dan mendapatkan pembinaan dari instansi terkait.

Kata kunci:

Lembaga Mediasi-Pemberdayaan Masyarakat-LKM Kube

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional pada hakekatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila, yakni terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Penanggulangan masalah kemiskinan merupakan salah satu wujud dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut. Berbagai program pengentasan kemiskinan

pernah digulirkan seperti Bantuan Presiden (Banpres), Bantuan Desa (Bandes), IDT, Raskin, dalam realitanya belum mampu menyelesaikan secara tuntas masalah kemiskinan. Belum terentasnya permasalahan kemiskinan bisa jadi bukan karena sedikitnya program penanganan kemiskinan tetapi lebih disebabkan tidak atau belum terintegrasi dan terkoordinasikannya program penanggulangan kemiskinan yang ada di

Kemiskinan merupakan fakta sosial yang bergerak dinamis sesuai dengan sistem sosial. Sebagai fakta sosial, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai masalah sosial yang multidimensional. Fluktuasi angka kemiskinan sangat terkait dengan kondisi sosial politik. Terkadang kemiskinan menjadi isu politik khususnya dalam proses pembangunan. Artinya, angka kemiskinan akan menjadi sangat besar jumlahnya pada saat pembangunan dan pendanaan membutuhkan data tentang kemiskinan, sebaliknya kemiskinan menjadi tertangani secara signifikan pada saat dilakukan evaluasi atas program penanganan kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2009 mencapai 32,53 juta (14,15 persen) dan pada bulan yang sama tahun 2010 turun menjadi 31,22 juta (13,33 persen) dari total penduduk. Menurut wilayah, pada Maret 2009 wilayah perkotaan mencapai 11,91 juta dan perdesaan mencapai 20,62 juta. Pada Maret 2010 penduduk miskin wilayah perkotaan 11,10 juta dan perdesaan turun tinggal 19,93 juta (BPS-Kompas, 12 Juli 2010). Jika dilihat jumlah rumah tangga miskin di Provinsi DIY tercatat sebanyak 476.744, menempati urutan 15 secara nasional. Jumlah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terbawah terlihat dalam Tabel 1.

Dilihat persebaran per kabupaten/kota, angka tertinggi terdapat di Kabupaten Bantul, disusul Gunungkidul, Sleman, Kulonprogo, dan Yogyakarta. Urutan tersebut tidak mencerminkan bahwa kabupaten dengan jumlah rumah tangga miskin terbanyak secara otomatis menempati urutan pertama karena jumlah keseluruhan tu-

mah tangga sebagai pembanding tidaklah sama, apabila dilihat secara persentasi urutannya akan berbeda. Data Tabel 1 semata-mata hanya memberi gambaran angka absolut jumlah rumah tangga miskin dan persebarannya, tidak serta merta merupakan gambaran tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah bersangkutan. Hal ini perlu diungkap karena sering terjadi bias pengertian antara kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber matapencaharian atau mempunyai tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Kebutuhan pokok meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Pemerintah telah berupaya mengatasi masalah kemiskinan dengan berbagai program dan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan masyarakat. Berbagai program penanggulangan kemiskinan memerlukan kerjasama, dukungan dan sinergi semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat. Kementerian Sosial sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, meluncurkan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui pola Kelompok Usaha Bersama (Kube) dengan penekanan pada Usaha Ekonomis Produktif (UEP). Penanggulangan kemiskinan melalui program Kube dengan UEP diarahkan untuk:

1. Mengubah sikap dan tingkah laku sosial

Tabel 1. Persebaran penduduk miskin dan fakir miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi DIY tahun 2011

Kab/Kota Jumlah	Miskin	Hampir Miskin	Mendekati Miskin	Rentan Miskin	
Kulonprogo	13.734	15.542	22.281	16.636	68.193
Bantul	45.176	33.995	38.960	23.373	141.506
Gunungkidul	34.734	33.546	38.538	23.449	130.267
Sleman	31.300	22.934	25.612	22.032	101.878
Yogyakarta	5.300	6.243	9.385	13.872	34.900
Jumlah	130.246	112.260	134.776	99.462	476.744

Sumber: PPLS 2011 dalam KR, 12 Januari 2013

2. Memberikan motivasi agar mempunyai kesadaran dan tergerak akan potensi yang dimiliki sehingga mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup, mengatasi masalah, dan mampu menampilkan peran sosialnya melalui bimbingan sosial.
3. Bimbingan keterampilan usaha
4. Pemberian bantuan stimulan modal kerja atau sarana berusaha
5. Pendampingan sosial yang berasal dari masyarakat (PSM, Karang Taruna, Orsos) atau dari petugas fungsional.

Program ini dirancang sesuai dengan potensi masyarakat miskin dan lingkungan tempat tinggalnya untuk meningkatkan kesejahteraan, interaksi dan atau kerjasama dalam kelompok, pendayagunaan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, penguatan budaya kewirausahaan, pengembangan akses pasar, dan jejaring kemitraan dengan berbagai pihak terkait. Kube sebagai program percepatan penanggulangan masalah kemiskinan selanjutnya diarahkan dan diintegrasikan dengan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ditujukan untuk memperkuat organisasi pengelola keuangan, pengelolaan simpan pinjam, peningkatan peranserta warga mampu dalam menangani kemiskinan, pengembangan kemitraan, peningkatan akses Kube terhadap mekanisme perbankan, dan memajukan LKM sebagai embrio koperasi.

Penanggulangan kemiskinan tidaklah mudah karena kemiskinan telah menimbulkan berbagai masalah seperti keterbatasan dalam pendidikan, keterampilan, kemampuan berusaha, dan kepemilikan sarana usaha. Menyimak kondisi tersebut, pola penanganan yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan harus mampu mengintegrasikan langkah-langkah dalam mengatasi berbagai keterbatasan tersebut. Penanganan kemiskinan dengan konsep pemberdayaan adalah suatu upaya yang memposisikan masyarakat miskin sebagai subjek pembangunan kesejahteraan sosial. Mereka dituntut aktif dalam setiap langkah kegiatan yang ditujukan pada perbaikan kesejahteraan dan memberikan apresiasi yang layak terhadap sumber potensi dirinya. Program Kube dan LKM yang dilakukan melalui model pemberdayaan

dengan mengedepankan tanggung jawab bersama dan kemudahan akses modal usaha merupakan salah satu alternatif penanggulangan masalah kemiskinan. Harapan program dan strategi yang diinisiasi pemerintah ini agar masyarakat miskin dapat memahami masalah yang dihadapi dan mencari solusi penyelesaian dengan mendayagunakan sumber potensi diri dan lingkungan. Tugas dan fungsi pemerintah dalam hal ini sebatas sebagai inisiator dan fasilitator.

Berdasar uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah peran LKM-Kube sebagai lembaga mediasi dalam pemberdayaan masyarakat? Tujuan yang akan dicapai adalah mengetahui peran LKM-Kube dalam pemberdayaan masyarakat, baik masyarakat miskin maupun masyarakat mampu. Lokasi penelitian dilakukan di LKM-Kube Sejahtera 14, Kecamatan Playen. Kecamatan ini menempati urutan pertama jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, yakni mencapai 6.875 dari 16.582 rumah tangga yang ada.

B. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (*empowerment*) bermakna “pemberian kekuasaan” karena *power* bukan sekedar “daya”, tetapi juga “kekuasaan”. Dengan demikian kata daya tidak saja berarti “mampu”, tetapi juga “mempunyai kuasa” (Wrihatnolo, 2007). Sejalan dengan pendapat tersebut, Payne mendefinisikan pemberdayaan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya, guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka. Tindakan pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk mendayagunakan sumber potensi yang dimiliki dan yang ada di sekitarnya untuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Agnes (2004) memberikan batasan, pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Edi Suharto (2005) memberi batasan, pem-

daya, peluang, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat dalam meningkatkan kapasitas mereka untuk menentukan masa depan sendiri dan mengambil bagian dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pemberdayaan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan *power* masyarakat yang kurang beruntung dan dimaknai sebagai upaya pengembangan, kemandirian, keswadayaan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat khususnya lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan. Pemberdayaan dapat bermakna, melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah dari persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang yang lemah atau tidak beruntung. Penjelasan yang lain, bahwa pemberdayaan memiliki dua kecenderungan:

- a. Kecenderungan primer: kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu semakin berdaya.
- b. Kecenderungan sekunder: kecenderungan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan/keberdayaan guna menentukan apa yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog (Oakley dan Marsden dalam Priyono, 1996: 34)

Upaya pemberdayaan ditujukan untuk kemandirian, yaitu kondisi tertentu yang membuat individu atau kelompok manusia tidak tergantung pada bantuan atau kederewanan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pemberdayaan juga dapat dimaknai sebagai usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial, yakni suatu cara mengarahkan rakyat, organisasi, dan komunitas agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadikan orang cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan atau mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan pada upaya orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan

yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Pemberdayaan merupakan suatu “proses menjadi” bukan “proses instan” (Wrihatnolo, 2007). Sebagai suatu proses, pemberdayaan perlu melalui tiga tahapan yakni penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Tahap pertama, sasaran yang hendak diberdayakan diberi pencerahan berupa penyadaran bahwa mereka berhak untuk mempunyai “sesuatu” dan dapat menjadi berdaya. Kondisi tersebut dapat tercapai apabila mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari permasalahan yang dialami. Upaya pemberdayaan dalam tahap ini berupa pemberian pengetahuan yang bersifat kognitif, *belief*, dan *healing* dengan target mereka menyadari dan memahami memang perlu diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat miskin dalam tahap ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial (PBS) yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, serta memotivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri. PBS dilakukan pada baik individu maupun komunitas yang sengaja dibentuk seperti kelompok usaha bersama (Kube).

Tahap kedua, berupa pengkapasitasan yang juga sering disebut dengan istilah “*capacity building*”, dalam bahasa sederhana yakni memampukan, *enabling*. Pengkapasitasan di sini dalam arti memampukan manusia baik dalam konteks individu maupun kelompok. Pengkapasitasan masyarakat miskin misalnya, dapat dilakukan dalam bentuk mengelompokkan mereka dalam suatu usaha bersama (Kube). Mengelompokkan dalam suatu jenis usaha yang dikelola secara bersama-sama disesuaikan dengan sumber potensi yang tersedia, serta mendapat pendampingan, diharapkan anggota memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Pengkapasitasan pada kelompok mampu dilakukan dengan penumbuhan kepedulian untuk membantu masyarakat sekitar yang kurang beruntung. Terkait dengan LKM-Kube, kepedulian masyarakat mampu diwujudkan dengan penyertaan modal atau tabungan yang akan dipinjamkan pada anggota Kube. Kepedu-

kegiatan yang langsung untuk kemajuan Kube seperti bimbingan keterampilan usaha, manajemen, dan pemasaran hasil.

Tahap ketiga, berupa pendayaan sistem nilai. Dalam hal ini sasaran pemberdayaan adalah aturan main yang disepakati. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kube menyangkut tata tertib dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan (*planning, organizing, actuating, controlling*). LKM-Kube, aturan main dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga merupakan sistem nilai yang disepakati dan mesti ditaati baik oleh semua pengurus maupun anggota. Pemberdayaan masyarakat khususnya dalam rangka penguatan kapasitas untuk pemenuhan kesejahteraan sedikitnya dapat dilihat dari dua pendekatan. Pertama, pendekatan teknokratis yakni pendekatan yang diawali dengan menetapkan program, kelompok sasaran, sistem penyaluran, pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta pengalokasian anggaran untuk mendukung pelaksanaan program. Pendekatan ini lebih cocok diterapkan pada daerah-daerah relatif miskin dengan sumberdaya manusia yang masih lemah. Sehingga memerlukan program pemberdayaan yang lebih bersifat *top down*. Dengan tidak dilibatkannya masyarakat sasaran dalam perencanaan, pendekatan ini mempunyai kelemahan, yakni seringkali tidak menyentuh kebutuhan riil mereka.

Kedua, pendekatan partisipatif yang memfokuskan kegiatan pada upaya pemberdayaan masyarakat yang umum dikenal sebagai suatu proses usaha memperkuat kemandirian (*community self-reliance*). Masyarakat dibantu, didampingi dan difasilitasi untuk menganalisis mulai dari masalah yang dihadapi, solusi yang dibutuhkan dengan memanfaatkan sumber potensi yang dimiliki, dan menciptakan aktivitas dengan kemampuan sendiri. Inisiatif masyarakat menjadi faktor penting yang mendasari keputusan suatu program kegiatan. Peran pemerintah sebatas sebagai fasilitator sementara pelaksana kegiatan adalah masyarakat sendiri. Kube merupakan program pengentasan kemiskinan yang diinisiasi oleh pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat secara

partisipatif untuk mengenali masalah dan kebutuhan, serta sumber dan potensi yang dapat di-dayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. LKM-Kube, program pembentukan LKM yang beranggotakan Kube diinisiasi pemerintah dengan melibatkan Kube yang sudah terbentuk terlebih dahulu sebagai anggota awal LKM. Baik Kube maupun LKM-Kube merupakan pemberdayaan masyarakat yang mengombinasikan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Inti dari pemberdayaan masyarakat meliputi tiga hal, yakni pengembangan (*enabling*), memperkuat posisi atau daya (*empowering*), dan tercapainya kemandirian (*selfsustained*). Bertitik tolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak terbatas dilakukan pada masyarakat yang *powerless*, tetapi juga bagi masyarakat yang memiliki daya dan mandiri (*powerfull*) untuk mau membagi kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan dan strategi dalam pengentasan kemiskinan sangat erat dengan proses pemberdayaan terhadap individu, kelompok, masyarakat miskin yang tergabung dalam Kube. Proses pemberdayaan yang dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemandirian, diharapkan mereka mampu menata kehidupannya secara lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidupnya. Pemberdayaan juga berlaku bagi anggota masyarakat yang relatif telah sejahtera, yakni dengan menyadarkan mereka untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu yang ada di lingkungannya. Anggota masyarakat mampu dapat menanam saham sebagai modal usaha LKM-Kube yang disalurkan bagi pengembangan usaha ekonomis anggota Kube dan masyarakat sekitar.

2. LKM-Kube sebagai Lembaga Mediasi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemberdayaan pada masyarakat lapisan bawah sangat jamak menggunakan lembaga mediasi yang berperan sebagai mediator antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Dalam istilah sosiologis, lembaga mediasi (*mediating structure*

yang memiliki posisi di antara wilayah kehidupan individu yang bersifat privat dengan lembaga yang berhubungan dengan kehidupan politik. Lembaga mediasi merupakan sarana untuk memberdayakan individu agar tidak mengalami keterasingan/keterpinggiran dalam menghadapi realitas makro seperti dominasi perusahaan korporasi, konglomerasi, dan birokrasi pemerintahan (Heru Nugroho, 2001).

Lembaga mediasi dapat dilihat sebagai sarana transfer dari makna privat ke publik atau sebaliknya. Lembaga mediasi merupakan jembatan antara individu atau masyarakat yang *powerless* dalam menghadapi kekuatan besar dalam lingkup kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Demikian pula sebaliknya, lembaga mediasi merupakan kepanjangan tangan dari kekuatan besar dalam menansfer kebijakan yang tidak mungkin dilakukannya sendiri. Posisi strategis yang dimiliki lembaga mediasi tersebut cenderung mengurangi alienasi bagi individu dan mengurangi ancaman keberadaan *public orders*. Berger dan Neuhass menunjuk pada lembaga keluarga, ketetanggaan, keagamaan, dan asosiasi keswadayaan merupakan contoh konkrit dari lembaga mediasi tersebut (Heru Nugroho, 2001: 204).

Pendayagunaan lembaga mediasi dalam kebijakan publik akan menghindari kecenderungan pemegang kekuasaan pengambil kebijakan bertindak *coercive* atau masyarakat melakukan penolakan sampai terjadi anarkhi atas kebijakan yang dituangkan dalam program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran lembaga mediasi dapat dipandang sebagai agen pembangunan. Teori strukturasi menjelaskan hubungan dialektika atau saling pengaruh mempengaruhi antara agen dan struktur. Ibarat dua sisi mata uang logam, agen dan struktur keduanya tidak dapat dipahami secara terpisah. Hal ini sejalan dengan pendapat Giddens yang menyatakan bahwa, agen dan struktur adalah dwi rangkap dengan asumsi tindakan sosial memerlukan struktur dan struktur memerlukan tindakan sosial. Agen dan struktur saling jalin menjalin tidak terpisahkan dalam praktik atau aktivitas manusia (Ritzer, Goodman, 2003).

Inti dari teori Giddens terletak pada pemikiran tentang struktur yang didefinisikan sebagai properti yang memungkinkan bagi penyelenggaraan praktik kegiatan secara terus menerus hingga berbentuk sistemik. Struktur hanya akan terwujud jika ada aturan dan sumberdaya melalui aktivitas manusia sebagai agen. Dalam penelitian ini keberadaan LKM-Kube merupakan agen sekaligus struktur yang diharapkan mampu membawa peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Peningkatan kesejahteraan sosial tidak semata-mata akan tercapai hanya dengan keberadaan LKM-Kube, tetapi anggota yang mendapatkan bantuan dan tergabung dalam Kube juga turut menentukan keberhasilan LKM-Kube dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Lembaga keuangan mikro (LKM) mempunyai potensi alternatif penting dalam pemberdayaan masyarakat, baik melalui pendekatan teknokratis maupun pendekatan partisipatif. Lembaga ini memiliki ciri-ciri dan keunggulan komparatif yang lebih sesuai untuk menjangkau masyarakat lapisan bawah. Pertama, LKM umumnya berasal, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat, telah terjalin hubungan akrab antara LKM dengan sasaran kegiatan baik perorangan maupun kelompok masyarakat. Interaksi sosial semacam ini sangat efektif untuk menjelaskan berbagai kebijakan sehingga memungkinkan masyarakat dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut. Kondisi ini menjadi pilar penting dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha yang dikembangkan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Posisi LKM menjadi agen perubahan terutama yang terkait dengan masalah pembiayaan, baik dalam konteks menjembatani kemauan pemerintah dan keinginan masyarakat maupun dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah.

Kedua, LKM pada umumnya dikelola oleh orang yang memiliki motivasi cukup tinggi untuk melayani kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah, motivasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat lapisan bawah mampu menum-

menghadapi masyarakat sasaran kegiatannya. Kegiatan yang diprogramkan dapat diubah atau dijadwal kembali sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. LKM digerakkan dengan semangat memberdayakan masyarakat dengan mengedepankan proses serta mengutamakan pelayanan dan keberlanjutan.

Ketiga, LKM merupakan himpunan masyarakat yakni antara pengelola dan nasabah yang jumlahnya tidak terlalu besar. Kondisi ini memungkinkan mereka saling mengenal dan saling mengetahui, sehingga memungkinkan mereka saling belajar mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan usaha. Berbagai pengalaman merupakan hal yang sangat berharga untuk menghindari kesalahan yang sama di masa datang. Jumlah anggota yang tidak terlalu besar juga memungkinkan LKM lebih efektif dalam melakukan aktualisasi dan pengendalian terhadap prioritas kegiatannya, sehingga jika di tengah jalan ditemukan hal yang menghambat keberhasilan, dapat segera dilakukan revisi.

Keterlibatan LKM dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari dua fungsi. Pertama, bersifat komplementer, yakni bergerak dalam kegiatan pengembangan keuangan yang karena alasan tertentu tidak digarap atau masih belum digarap secara intensif oleh pemerintah. Fungsi komplementer ini menempatkan LKM menjadi institusi alternatif bukan dalam arti cadangan atau pengganti akan tetapi menjadi institusi pilihan tempat masyarakat menaruh dan mempertaruhkan harapan bagi pengembangan usahanya. Kedua, bersifat subsider atau peran tambahan dalam arti sebagai institusi yang memberikan *support*, menunjang atau menjadi pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dirancang pemerintah. Kedudukan LKM bukan sekedar kepanjangan tangan pemerintah tetapi menjadi *partner* yang mampu memberi masukan dan kontrol atas kebijakan pemerintah.

Peran serta LKM-Kube dapat dimaknai sebagai partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya bidang kesejahteraan sosial yang telah terwadahi dalam suatu organisasi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diyakini banyak pihak telah

menjadi kata kunci dalam pengembangan pembangunan di era otonomi daerah. Keberhasilan pembangunan menyaratkan adanya partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, penyusunan kebijakan program, pelaksanaan kegiatan, dan pengendalian. Masyarakat tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek pembangunan tetapi sekaligus sebagai subjek. Dalam konteks *good governance*, partisipasi merupakan salah satu bagian dari tiga elemen penting selain transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi dapat dimaknai sebagai jembatan penghubung antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, kewenangan, dan kebijakan dengan masyarakat yang memiliki hak sipil, politik, dan sosial ekonomi.

Mubyarto (1988) mengartikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa harus mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi masyarakat bukan sebuah proses mobilisasi tetapi sikap sukarela untuk membantu keberhasilan program pembangunan. Keikutsertaan masyarakat pada dasarnya juga meningkatkan posisi mereka karena dilibatkan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan publik menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Juliantara (2002) yang menyatakan, bahwa substansi partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dengan tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan masyarakat. Kemampuan masyarakat dalam mengenali permasalahan dan sumber potensi yang ada pada diri dan lingkungannya merupakan prasyarat tumbuhnya partisipasi, diperlukan upaya pemberdayaan agar masyarakat memiliki daya dan kuasa dalam memahami permasalahan dan mampu mendayagunakan sumber potensi baik yang ada pada diri mereka maupun lingkungan.

LKM-Kube keberadaannya sesuai dengan tujuan pengembangan partisipasi karena dibentuk oleh dan untuk masyarakat meskipun peran pemerintah sebagai fasilitator tidak mungkin diabaikan. Anggota memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas peningkatan

kekeluargaan dan kebersamaan akan memudahkan dalam mengatasi persoalan baik yang berasal dari intern anggota dan organisasi maupun di luar organisasi (ekstern), dibanding harus dihadapi secara mandiri.

C. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini sebagai penelitian deskriptif, yang berupaya menggambarkan yang dilakukan LKM-Kube Sejahtera 14, Playen dalam memberdayakan masyarakat. Sumber data berjumlah 22 orang berasal dari pengurus LKM dua orang dan 20 orang dari pengurus 10 Kube anggota LKM (dua orang per Kube). Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan, observasi pada LKM-Kube Sejahtera 14 Playen, dan Kube binaan LKM, serta telaah dokumen atas laporan dan arsip penting. Analisis data dilakukan secara kualitatif, model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007), dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas dengan proses reduksi (*reduction*), penyajian (*display*), dan kesimpulan (*conclusion*). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya terkait dengan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan LKM-Kube. Penyajian data dilakukan dengan bantuan tabel dan pemaknaan dalam uraian singkat berbentuk teks yang bersifat naratif berasal dari wawancara dengan sumber data, selanjutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti hasil pengumpulan data yang telah melalui proses reduksi dan penyajian.

D. Hasil Penelitian: Peranan LKM-Kube dalam Pemberdayaan Masyarakat

LKM Kube Sejahtera 14 Playen didirikan dengan bantuan dana APBD Kabupaten Gunung Kidul dan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) yang berasal dari APBN tahun anggaran 2011. LKM ini diresmikan tanggal 28 Juli 2011 oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY, bertempat di Jln Playen Getas KM 1, Tumpak, Ngawu, Playen, Gunungkidul. Pendirian LKM-Kube Sejahtera 14 dimaksudkan sebagai pelaksana program pemberdayaan fakir miskin melalui Pola Terpadu Kube dan LKM-BMT di

daerah Adopsi Desa Miskin (ADEM). Pembentukan berbagai LKM Kube di beberapa wilayah di dasarkan pada Surat Keputusan Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial nomor 797/SK/BJS/IX/2005 tentang Penetapan dan Pengesahan LKM-Kube Sejahtera sebagai pelaksana program pemberdayaan fakir miskin melalui Pola Terpadu Kube dan LKM-BMT.

Keberadaan LKM-Kube Sejahtera 14 didukung oleh 10 Kube yang ada di lingkungan Kecamatan Playen. Kesepuluh Kube tersebut adalah Amrih Cukup, Bibit Mulya, Handayani 102, Handayani 121, Handayani 122, Kecukupan, Lestari, Lumintu, Urip Lumintu, dan Urip Anyar. Kesepuluh Kube masing-masing beranggotakan 10 orang kepala keluarga dengan kategori keluarga miskin, semuanya bergerak dalam peternakan sapi, baik penggemukan maupun budidaya. Profil kesepuluh Kube anggota sekaligus pendiri LKM-Kube Sejahtera 14 adalah sebagai berikut.

Amrih Cukup, didirikan tahun 2005 bertempat di Dusun Menggoran 1, Desa Bleberan, Kecamatan Playen. Kegiatan awal berupa peternakan sapi berupa bantuan dari Kementerian Sosial yang diserahkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul. Dalam perkembangannya, kegiatan yang dilakukan tidak hanya sebatas peternakan sapi tetapi juga arisan dan simpan pinjam yang dilakukan dalam pertemuan rutin bulanan setiap tanggal 10. Dalam pertemuan tersebut dibahas juga permasalahan yang dihadapi, baik kelompok maupun individu dan dicarikan cara penyelesaiannya. Dari usaha ternak sapi, anggota Kube mendapatkan hasil anakan sapi dua sampai tiga kali. Kelompok ini telah memiliki kekayaan enam juta rupiah hasil . 5.000,-

yang dikumpulkan pada waktu pertemuan rutin bulanan dan jasa pinjaman uang kas yang dimanfaatkan oleh anggota kelompok.

Bibit Mulyo, didirikan pada tahun 2005 bertempat di Dusun Dengok VI, Desa Dengok. Kube ini bergerak dalam usaha ternak sapi. Kegiatan berkembang dengan simpan pinjam dan arisan yang dilakukan saat pertemuan rutin setiap bulan pada tanggal 5. Sampai saat ini telah terkumpul modal kelompok sekitar lima

jasa hasil dari simpan pinjam anggota kelompok. Kelompok ini juga mengadakan kerja kelompok dalam meringankan anggotanya. Dalam meningkatkan ekonomi keluarga, istri anggota Kube membuat keripik pisang yang dititipkan pada warung-warung terdekat. Kelompok ini juga melaksanakan kegiatan sosial seperti kerja bakti, menjenguk orang sakit, melayat serta membantu apabila ada anggota warga yang mempunyai hajatan. Dalam rangka membantu anggotanya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, di antara anggota Kube sudah terbiasa saling bekerjasama dalam mengolah sawah atau lahan pertanian.

Handayani 102, beralamatkan di Dusun Ngasemrejo, Desa Ngawu, Playen. Kelompok ini berdiri pada tahun 2006, bergerak dalam pengembangan usaha ternak sapi. Kelompok ini berdiri atas dasar keinginan serta kemauan warga dengan tujuan sebagai tempat penyalur aspirasi anggota. Kegiatan lain yang dilakukan adalah simpan pinjam dan arisan yang dilaksanakan pada pertemuan rutin bulanan setiap tanggal 6. Kube ini telah memiliki modal sekitar tujuh juta rupiah yang berasal dari iuran wajib Rp 5.000,- per bulan dan jasa pinjaman anggota. Masing-masing anggota sudah mendapatkan anakan sapi sebanyak dua kali. Kelompok ini juga melaksanakan kegiatan sosial, seperti kerja bakti di lingkungan sekitar, membantu hajatan dan membangun rumah tetangga. Sifat gotong royong dalam kelompok ini masih dilestarikan, tujuannya untuk meringankan beban anggota.

Handayani 121, beralamat di Dusun Ngunut Lor, Desa Ngunut yang didirikan pada tahun 2006. Kelompok ini mengembangkan usaha ternak sapi sebagai jalan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan menopang kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat dan semakin mahal. Kegiatan yang dilakukan kelompok ini antara lain mengadakan pertemuan rutin yang dilaksanakan pada tanggal 5 setiap bulannya. Modal usaha yang berasal dari iuran wajib anggota dan jasa simpan pinjam telah mencapai sekitar lima juta rupiah. Kelompok ini juga memiliki usaha pembuatan keripik pisang dan emping melinjo yang melibatkan isteri dalam produksi dan pemasarannya. Kelompok ini juga melakukan kegiatan sosial seperti menjenguk orang

sakit bagi anggota, kerja bakti, gotong royong, dan membantu orang yang sedang mempunyai hajatan, mengadakan simpan pinjam dan arisan serta kerja gotong royong dalam mengerjakan lahan pertanian. Kegiatan ini dilakukan secara bergiliran dan tidak dipungut biaya bagi anggota kelompok yang mendapatkan jatah giliran.

Handayani 122, beralamat di Dusun Ngunut Lor, Desa Ngunut berdiri pada tahun 2006 yang bergerak dalam pengembangan usaha ternak sapi. Kegiatan yang dilakukan dalam kelompok ini antara lain simpan pinjam, arisan dan juga kegiatan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Kegiatan pertemuan dalam kelompok dilaksanakan tanggal 10 setiap bulannya dengan agenda arisan, simpan pinjam, dan memecahkan masalah yang dihadapi anggota. Modal kelompok terkumpul sekitar tujuh juta rupiah yang digunakan untuk pengembangan usaha anggota melalui simpan pinjam dengan batas waktu pengembalian 10 bulan. Kube ini juga mengadakan kerja kelompok dengan tujuan untuk meringankan anggotanya dalam mengerjakan ladang dengan cara bergiliran, tetapi tidak dipungut biaya hanya menyediakan makan untuk anggota kelompok.

Kecukupan, didirikan pada tahun 2008 yang beralamat di Dusun Menggoran, Desa Bleberan dengan usaha yang dikembangkan ternak sapi. Kube ini juga melakukan kegiatan pertemuan rutin dilaksanakan tanggal 7 setiap bulannya, diisi dengan simpan pinjam dan arisan. Sampai saat ini telah terkumpul modal usaha sebesar lima juta rupiah. Masing-masing anggota telah memiliki setidaknya dua ekor sapi. Kelompok ini mempunyai kegiatan sosial seperti menjenguk orang sakit, melayat dan membantu warga di lingkungan sekitar yang sedang mempunyai hajatan. Kelompok ini mengambil nama kecukupan dengan maksud agar dalam kehidupan dan usaha yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat menciptakan keluarga yang sejahtera. Kelompok ini juga mengembangkan industri rumah tangga pembuatan kripik yang dilakukan oleh istri anggota Kube, kegiatan tersebut selain untuk mengisi waktu luang juga menambah penghasi-

Lestari, di dirikan pada tahun 2004, beralamat di Dusun Toboyo, Desa Plembutan, Kecamatan Playen yang bergerak dalam bidang usaha ternak sapi. Kube ini juga menjalankan berbagai kegiatan seperti Kube lainnya, yakni simpan pinjam, arisan dan kegiatan sosial seperti membesuk orang sakit, kerja bakti dan juga melayat apabila ada warga yang meninggal. Pertemuan rutin Kube Lestari dilakukan setiap tanggal 10 untuk setiap bulannya. Modal usaha yang dikumpulkan dari iuran wajib dan jasa pinjaman anggota telah mencapai sekitar tujuh juta rupiah. Rata-rata anggota telah memiliki dua-tiga ekor sapi hasil pengembangan dari modal awal yang diperoleh dari dinas sosial. Beberapa anggota kelompok ini juga mengembangkan usaha warung, baik di rumah maupun di pasar.

Lumintu, didirikan pada tahun 2004 yang beralamat di Dusun Plembutan Timur, Desa Plembutan, Kecamatan Playen. Usaha yang dikembangkan adalah ternak sapi. Kelompok ini juga mengadakan pertemuan rutin yang diselenggarakan setiap bulan pada tanggal 8 dengan kegiatan simpan pinjam, arisan, dan memecahkan masalah bila salah satu anggota kelompok mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Sampai saat ini, kelompok telah memiliki modal usaha sekitar sembilan juta rupiah, yang berasal dari iuran wajib anggota yang dikumpulkan sebesar Rp 5.000,- per bulan, jasa pinjaman, dan jasa kerja kelompok. Kerjasama antaranggota kelompok dalam mengerjakan sawah atau lahan pertanian dilakukan dengan pemberian upah di bawah standar upah pada umumnya, yakni Rp 25.000,- per hari. Dari upah tersebut, yang Rp 5.000,- dimasukkan dalam tabungan atas nama yang bersangkutan, dan sisanya Rp 20.000,- dibawa pulang. Sistem ini mengajarkan masyarakat khususnya anggota kelompok untuk menabung, dengan cara menyisihkan sebagian hasil usahanya.

Makmur Lumintu, beralamat di Dusun Nogosari, Bandung, Kecamatan Playen, didirikan pada tahun 2005 dengan jenis usaha mengembangkan ternak sapi yang sesuai dengan kondisi alam sekitar yang mendukung bagi pengembangan usaha ternak. Kelompok ini juga mempunyai kegiatan simpan pinjam, dan arisan yang diselenggarakan pada pertemuan rutin

bulanan setiap tanggal 5. Modal usaha yang berasal dari iuran wajib Rp 5.000,- per bulan dan jasa pinjaman anggota sampai saat ini telah terkumpul sekitar delapan juta rupiah. Rata-rata anggota telah menikmati anakan sapi antara dua-tiga kali. Bagi anggota yang tidak memiliki keperluan mendesak, sapi tersebut dipelihara sampai berkembang biak menjadi tiga-empat ekor. Anggota yang memiliki keperluan, dapat menjual anakan sapinya

Urip Anyar, beralamat di Dusun Tanjung 1, Desa Bleberan, Playen yang didirikan pada tahun 2004. Kegiatan rutin dalam kelompok ini antara lain simpan pinjam, arisan dan kegiatan sosial. Modal usaha sekitar sembilan juta rupiah yang berasal dari iuran wajib, jasa pinjaman, dan denda ketidakhadiran anggota pada pertemuan rutin. Tujuan diadakan pertemuan rutin antara lain untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan di antara anggota kelompok. Kelompok ini juga membuat perjanjian bagi yang tidak hadir tanpa keterangan akan mendapatkan denda sebesar Rp 1.000,- yang nantinya dimasukkan dalam kas. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar semua anggota dapat menghadiri pertemuan yang telah ditetapkan. Kelompok ini juga mengadakan kerja bakti di lingkungan sekitar, sehingga lingkungan sekitar warga kelihatan bersih dan sehat walaupun banyak warga yang memiliki hewan ternak. Kegiatan yang mereka kembangkan berupa penggemukan ternak sapi.

Kesepuluh anggota LKM-Kube Sejahtera 14 semuanya bergerak dalam peternakan sapi, baik penggemukan maupun budidaya pengembangbiakan. LKM Kube Sejahtera 14 selain bertindak sebagai penyimpan tabungan anggota Kube dan masyarakat sekitar, juga memberikan pinjaman bagi anggotanya. Anggota kesepuluh Kube yang secara otomatis juga merupakan anggota LKM-Kube Sejahtera 14 sangat merasakan manfaat keberadaan lembaga ini, khususnya bagi pengembangan usaha dan pembiayaan yang mendesak, seperti membayar rumah sakit, membayar keperluan sekolah anak, dan hajatan. Pinjaman anggota Kube pada LKM-Kube Sejahtera 14 tidak mensyaratkan adanya agunan, karena pada dasarnya modal awal dari

dananya berasal dari hibah pemerintah melalui Kementerian Sosial.

Di samping usaha yang sifatnya ekonomis produktif, kesepuluh Kube juga memiliki kegiatan sosial berupa pertemuan rutin yang diisi dengan arisan, simpan pinjam, dan pembahasan permasalahan yang dihadapi anggota. Gotong royong antarwarga sebagai modal sosial kehidupan masyarakat pedesaan masih hidup subur di wilayah Kecamatan Playen. Gotong royong diimplementasikan dalam kegiatan hajatan, pembangunan rumah, penggarapan ladang dan sawah, dan pembuatan kandang sapi antaranggota kelompok Kube.

LKM-Kube Sejahtera 14 berbentuk koperasi dengan anggota awal seluruh anggota dari 10 Kube yang tergabung, meskipun pengelolaan LKM-Kube dilakukan oleh pengurus harian yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan staf administrasi, tetapi kewenangan tertinggi ada pada anggota yang dimanifestasikan dalam bentuk rapat anggota tahunan. Tujuan pembentukan LKM-Kube Sejahtera 14 untuk meningkatkan perekonomian khususnya bagi anggota dan masyarakat sekitarnya. Visi lembaga berupa memanfaatkan potensi alam serta pengelolaan secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan dan memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat secara optimal. Visi tersebut dijabarkan dalam misi berupa upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri, kreatif, serta inovatif dalam meningkatkan kesejahteraan. Tujuan, visi, dan misi LKM-Kube Sejahtera 14 sejalan dengan tujuan, kemanfaatan, visi, dan misi pembentukan LKM-Kube Sejahtera secara nasional. Tujuan pembentukan LKM-Kube Sejahtera adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Manfaat keberadaan LKM-Kube Sejahtera adalah sebagai berikut. (1) Meningkatkan kemandirian anggota Kube dengan memanfaatkan pembiayaan modal kerja dari LKM-Kube Sejahtera. (2) Membuka peluang tumbuh dan berkembangnya jiwa wirausaha bagi anggota Kube maupun masyarakat sekitar dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. (3) Membangun budaya hidup hemat dengan membiasakan diri menabung secara disiplin di LKM-Kube

Sejahtera. (4) Keberadaan LKM-Kube akan lebih mandiri dan berkelanjutan. (5) Kesejahteraan masyarakat semakin meningkat yang akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) setempat. (6) Kehidupan warga masyarakat lebih cerah, terjamin, dan terencana.

Visi yang ditetapkan oleh penggagas model LKM-Kube Sejahtera adalah menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat dengan kualitas anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Sementara misi yang diemban berupa: (1) Gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi. (2) Gerakan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi nyata. (3) Kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju. (4) Mewujudkan gerakan keadilan dalam membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan sistem ekonomi yang transparan dan adil.

Sebagai lembaga milik dan dibawah kendali masyarakat setempat secara otomatis keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha LKM-Kube menjadi hak milik masyarakat, maju mundurnya LKM-Kube sangat ditentukan oleh kepentingan, kepedulian, dan kemanfaatan lembaga bagi masyarakat. Modal awal LKM-Kube Sejahtera 14 sebesar Rp 147.500.000,-, berupa setoran dari 10 Kube anggota yang dananya berasal dari pemerintah. Sampai dengan 31 September 2013, aset LKM-Kube Sejahtera 14 telah berkembang menjadi Rp 287.789.100,-. Aset LKM-Kube Sejahtera 14 terlihat dalam Tabel 2.

No	Iuran	Jumlah (dalam rupiah)
1	Iuran wajib 10 Kube @ 14.750.000,-	147.500.000,-
2	Investasi kantor	67.344.300,-
3	Iuran wajib anggota non kube	8.550.000,-
4	Simpanan pokok anggota	1.200.000,-
5	Tabungan Masyarakat	63.194.800,-
	Jumlah	287.789.100

Melihat komposisi aset LKM-Kube Sejahtera 14 di atas, dapat dimaknai bahwa mayoritas pemilik aset adalah anggota 10 Kube, berupa iuran wajib dan simpanan pokok. Pembentukan LKM-Kube Sejahtera memang ditujukan menjadi lembaga pembiayaan yang mudah diakses oleh masyarakat miskin tanpa dibebani dengan berbagai persyaratan yang memberatkan. Semangat kebersamaan dan kesadaran akan potensi yang dapat dikembangkan apabila masyarakat berkelompok merupakan roh dari Kube dan LKM-Kube. Kegiatan LKM-Kube Sejahtera 14 berupa menggalang dana masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan pinjaman pembiayaan kepada masyarakat untuk usaha produktif dan kebutuhan mendesak, dan memfasilitasi pelatihan pengelolaan manajemen bagi Kube anggotanya.

Masyarakat yang tergabung dalam Kube menanam saham pada LKM dalam bentuk tabungan kelompok, tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi anggota Kube yang telah mampu untuk menanam saham secara mandiri. Partisipasi masyarakat non-Kube dalam LKM-Kube Sejahtera 14 berupa simpanan, yakni Tabungan Masyarakat Sejahtera (TAMARA). Pengelolaan tabungan masyarakat dilakukan dengan sistem koperasi, dengan penerbitan buku sebagai bukti simpanan dan mendapatkan sisa hasil usaha (SHU), yang diperhitungkan setahun sekali menjelang rapat anggota tahunan, bukan jasa bunga sebagaimana tabungan dalam bank. LKM-Kube Sejahtera 14 juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan, pelatihan keterampilan usaha, dan pengelolaan keuangan dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kube anggota LKM pernah mengikuti diklat manajemen koperasi dan usaha kecil menengah yang difasilitasi oleh Kementerian Koperasi, dan diklat pengembangan kapasitas pengurus serta pengelola UKM yang diselenggarakan oleh dinas sosial bekerjasama dengan pusat inkubasi usaha kecil (PINBUK).

Keberadaan LKM-Kube dirasakan manfaatnya tidak saja oleh anggota Kube tetapi juga masyarakat di wilayah Kecamatan Playen, seperti mendorong kegiatan menabung, membantu pembiayaan kegiatan usaha ekonomi

dan kebutuhan mendesak, serta menerima dan mendistribusikan zakat, infaq dan sodaqoh. Kemudahan dalam mendapatkan pinjaman sangat dirasakan oleh masyarakat meskipun jumlah maksimal perorangan hanya dua juta rupiah dengan batas waktu pengembalian 24 bulan. Pinjaman secara berkelompok (Kube) dapat diberikan maksimal 50 juta rupiah dengan waktu pengembalian 36 bulan. Tanggung jawab pengembalian pinjaman sistem kelompok ada pada seluruh anggota, artinya apabila ada anggota yang tidak mampu mengangsur anggota lainnya harus menutup, bisa juga diambilkan dari uang kas kelompok terlebih dahulu. Pemberian pinjaman secara berkelompok ini seperti pada sistem Gramen Bank di Bangladesh yang digagas oleh Muhammad Yunus. Bedanya, kelompok Kube yang menjadi anggota LKM mayoritas anggotanya laki-laki, sementara kelompok Gramen Bank semuanya perempuan. Asumsi penggagas Gramen Bank, perempuan lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dibandingkan laki-laki karena pada dasarnya yang paham akan kebutuhan rumah tangga adalah isteri.

Hasil pemberdayaan Kube dan LKM-Kube dilihat dari indikator kesejahteraan rakyat yang meliputi peningkatan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan menunjukkan adanya perubahan. Semua responden menyatakan bahwa ada peningkatan pendapatan yang mereka peroleh setiap bulannya. Bapak Amat Jamzuri dari Kube Bibit Mulyo menyatakan berikut. "Pada awal berdirinya LKM saya pinjam uang sebesar 500 ribu rupiah untuk modal usaha keripik pisang yang dikerjakan oleh istri saya. Karena permintaan makin banyak dan pinjaman sudah lunas, saya pinjam lagi sebesar dua juta rupiah yang harus dikembalikan selama 24 bulan. Jumlah penghasilan saya per bulan tidak tentu, akan tetapi yang jelas ada peningkatan, buktinya saya mampu memperbaiki rumah dan menyekolahkan anak." (wawancara, 2013).

Pendapat senada dikemukakan oleh bapak Ngatiman dari Kube Handayani 121. "Pekerjaan saya semula hanya tani, setelah tergabung dalam Kube saya mendapat bantuan seekor sapi. Dalam dua tahun telah berkembang menjadi dua

mengajukan pinjaman sebesar 50 juta rupiah yang kemudian dibelikan anakan sapi sebanyak 10 ekor. Saat ini saya sudah punya lima ekor sapi. Karena ingin menambah penghasilan keluarga, saya secara pribadi mengajukan pinjaman pada LKM sebesar dua juta rupiah untuk modal usaha pembuatan keripik pisang dan emping melinjo. Alhamdulillah, pinjaman tersebut telah lunas, usaha saya masih berjalan sampai saat ini.” (wawancara, 2013). Dampak program Kube dan keberadaan LKM-Kube terhadap peningkatan pendapatan responden terlihat pada Tabel 3.

No	Uraian	Sebelum	Sesudah
1	< Rp 1.000.000,-	4	-
2	Antara Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000	11	7
3	Antara Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000	5	8
4	> Rp 2.000.000,-	2	7

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan responden sebelum tergabung dalam Kube mayoritas antara Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000,-. Responden yang berpendapatan Rp. 1.000.000,- - Rp 1.500.000,- sebanyak 11 orang (50 persen), dan antara Rp 1.500.000,- - Rp 2.000.000,- terdapat lima orang (22,70 persen). Pendapatan tersebut mereka peroleh dari profesi yang dijalani yakni sebagai tukang kayu atau tukang batu dengan upah rata-rata Rp 45.000,- - Rp 65.000,-. Setelah responden menjadi anggota Kube rata-rata pendapatan mereka meningkat, tidak ada lagi yang berpenghasilan Rp 1.000.000,- per bulannya. Sebanyak tujuh orang memberikan jawaban masih berpenghasilan antara Rp 1.000.000,- - Rp 1.500.000,-, dan 15 orang lainnya mempunyai pendapatan > Rp 1.500.000,-. Peningkatan pendapatan responden diperoleh dari penjualan pupuk kandang dan keuntungan penjualan kripik pisang atau emping melinjo, usaha yang mereka jalankan setelah tergabung dalam Kube dan mendapatkan pembinaan serta pinjaman modal dari LKM-Kube Sejahtera 14.

Peningkatan pendapatan di atas tidak lepas dari ketepatan pemilihan usaha yang disesuaikan dengan sumber potensi wilayah. Kecama-

tan Playen merupakan wilayah dengan kondisi relatif subur, dengan lahan luas berupa hutan lindung, tegalan, dan sawah. Usaha ternak sapi dan kambing sangat cocok dikembangkan mengingat ketersediaan bahan pangan (rumput dan tanaman) cukup banyak. Pengembangan UEP emping melinjo dan keripik pisang berasal dari dua bahan baku yang banyak tersedia di lahan-lahan warga masyarakat. LKM-Kube Sejahtera 14 mampu memotivasi anggota untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui pengembangan usaha dengan memanfaatkan sumber potensi setempat. Peningkatan pendapatan responden ternyata juga berimplikasi pada peningkatan kemampuan mereka dalam menyekolahkan anak. Hal ini terlihat dalam Tabel 4.

Tabel 4. Kemampuan Responden Menyekolahkan

No	Uraian	Sebelum	Sesudah
1	Sekolah Dasar	22	22
2	Sekolah Menengah Pertama	17	22
3	Sekolah Menengah Atas/Kejuruan	13	20
4	Perguruan	3	10

Keduapuluhdua responden baik sebelum maupun setelah tergabung dalam Kube semuanya mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang sekolah dasar (SD). Hal ini terkait dengan kebijakan wajib belajar 9 tahun, dimana semua biaya pendidikan anak mendapat bantuan pemerintah kecuali peralatan pribadi. Walaupun wajib belajar sampai jenjang sekolah menengah pertama, kenyataannya terdapat 5 orang responden yang tidak mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Alasan utama ketidakmampuan mereka dalam hal pembiayaan transportasi harian, sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang responden berikut. “Memang semua biaya sekolah gratis, bahkan jika menunjukkan surat keterangan miskin, anak juga mendapatkan bantuan peralatan pribadi. Akan tetapi jarak rumah dengan SMP begitu jauh dan harus naik angkutan umum atau ojek. Untuk membayar biaya transport harian tersebut

saya terima setiap hari Sabtu.” Setelah mereka tergabung dalam Kube, semua responden mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang SMP bahkan terjadi peningkatan yang cukup tajam dalam hal kemampuan menyekolahkan anak sampai jenjang SLTA dan perguruan tinggi.

Kemampuan keuangan keluarga, tambahan wawasan dalam setiap pertemuan anggota Kube dan pembinaan dari LKM-Kube dan dinas sosial setempat, serta pergaulan yang semakin luas dengan dunia luar terkait dengan usaha yang ditekuni mampu mengubah pola pikir terkait dengan pendidikan anak. Semua responden sepakat bahwa pendidikan sangat penting untuk mempersiapkan masa depan anak. Di samping karena luas lahan yang dimiliki semakin sempit karena pembagian warisan sehingga berdampak pada keterbatasan lahan garapan yang tentunya juga akan berdampak pada pendapatan, responden menginginkan anak-anaknya memperoleh penghasilan dari profesi selain petani dan peternak. Kegiatan pertanian dan peternakan dilakukan sebagai kegiatan sampingan, agar anak-anak mudah mendapatkan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal kemudian dibekali dengan pendidikan yang memadai.

Di bidang kesehatan, semua anggota Kube mampu mengakses layanan mulai dari puskesmas sampai rumah sakit umum daerah, baik kabupaten maupun provinsi dengan adanya Jamkesmas dan Jamkesda. Berdasarkan pengakuan responden jika antrian di puskesmas terlalu banyak atau sakit yang memerlukan rawat inap, mereka memanfaatkan rumah sakit swasta yang ada di Kecamatan Playen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan sudah sangat memadai. Menurut responden, memiliki kartu Jamkesmas dan Jamkesda sangat membantu dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga tidak merasa resah dan gelisah apabila mengalami sakit karena sudah ada jaminan dari pemerintah walau tidak sepenuhnya semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Salah satu responden mengatakan bahwa layanan kesehatan merupakan hal yang sangat diharapkan oleh setiap manusia dengan

harapan dipermudah dalam pelayanan. Kondisi rumah seluruh anggota 10 Kube (100 orang) hasil wawancara dengan ke 22 orang responden terlihat dalam Tabel 5.

Tabel 5. Kondisi Rumah Anggota antara Sebelum

No	Uraian	Sebelum	Sesudah
1	Dinding bambu, lantai tanah	37	10
2	Dinding papan, lantai tanah	34	4
3	Dinding tembok, lantai plesteran	20	35
4	Dinding tembok, lantai ubin	6	10
5	Dinding tembok, lantai keramik	3	41

Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang dan berfungsi sebagai tempat berkumpulnya anggota keluarga. Berdasarkan tabel di atas, kondisi rumah anggota sebelum mengikuti program Kube masih ada yang sangat memprihatinkan, berdinding bambu dan berlantai tanah sebanyak 37 orang, setelah bergabung dalam Kube tinggal 10 orang yang berumah dengan kondisi tersebut. Kesepuluh orang yang masih berumah dengan kondisi dinding bambu dan lantai tanah karena masih tinggal di tanah orangtuanya yang belum dibagi waris, sehingga masih ragu-ragu untuk merenovasi menjadi rumah yang lebih layak. Mayoritas anggota Kube mampu merenovasi rumah tinggalnya, bahkan mayoritas sudah memiliki rumah layak huni dengan dinding tembok dan lantai ubin atau keramik. Kemampuan anggota Kube dalam merenovasi rumah tidak lepas dari peningkatan pendapatan keluarga dan keinginan untuk hidup lebih sehat serta layak. Keberadaan LKM-Kube sebagai lembaga yang menerima tabungan dan pemberi pinjaman bagi anggota, mampu berperan sebagai dinamisator pembangunan di wilayah kerjanya.

E. Penutup

Keberadaan program Kube di Kecamatan Playen yang dimulai sekitar tahun 2004-2005 dan pendirian LKM-Kube pada tahun 2010 ter-

Kesepuluh Kube anggota LKM-Kube Sejahtera 14 yang bergerak dalam usaha ternak sapi baik penggemukan maupun budidaya berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga. Diversifikasi usaha juga dilakukan oleh beberapa anggota Kube disesuaikan dengan sumber potensi setempat, seperti pembuatan keripik pisang dan emping melinjo. LKM-Kube Sejahtera 14 berhasil sebagai lembaga mediasi antara pemerintah dengan masyarakat, dan antara masyarakat mampu dengan yang kurang mampu. Lembaga ini mampu menggerakkan peranserta masyarakat yang memiliki kemampuan lebih untuk menabung di LKM-Kube, bagi anggota Kube timbul kesadaran untuk menabung dan mengembangkan usaha yang modalnya mereka peroleh dari pinjaman di LKM-Kube.

Keberadaan LKM-Kube perlu dipertahankan mengingat, pertama sifatnya komplementer, yakni bergerak dalam kegiatan pengembangan keuangan yang karena alasan tertentu tidak digarap atau masih belum digarap secara intensif oleh pemerintah. Fungsi komplementer ini menempatkan LKM menjadi institusi alternatif bukan dalam arti cadangan atau pengganti akan tetapi menjadi institusi pilihan tempat masyarakat menaruh dan mempertaruhkan harapan bagi pengembangan usahanya. Kedua, bersifat subsider atau peran tambahan dalam arti sebagai institusi yang memberikan *support*, menunjang atau menjadi pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dirancang pemerintah. Kedudukan LKM bukan sekedar kepanjangan tangan pemerintah tetapi menjadi partner yang mampu memberi masukan dan kontrol atas kebijakan pemerintah. LKM-Kube masih memerlukan pembinaan agar lebih tertata dan maju, khususnya dari dinas koperasi terkait dengan manajemen pengelolaan, dari dinas sosial perihal bimbingan motivasi pada anggota, serta dinas perindustrian dan perdagangan dalam hal diversifikasi usaha dan jejaring kerja.

Pustaka Acuan

- Agnes Sunartiningih, dkk, (2004), *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Aditya Media
- Departemen Sosial, (2004), *Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube*

dan Lembaga Keuangan Mikro, Jakarta: Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin.

- , (2005), *Panduan Program Pemberdayaan Fakir Miskin*, Jakarta: Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin.
- Dadang Juliantara, (2002), *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Yang Terbawah*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama
- Edi Suharto, (2005), *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama
- , (2004), *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin Indonesia*, Bandung: STKS Press
- Heru Nugroho, (2001), *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Istiana Hermawati, dkk, (2011), *Evaluasi Program Kelompok Uaha Bersama*, Yogyakarta: B2P3KS Press
- Kementerian Sosial, (2011), *Pedoman Kelompok Usaha Bersama*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
- Maulana Ibrahim, (2003), *Kerangka Hukum Dalam Memperkuat dan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia*, dalam *Kemiskinan dan Keuangan Mikro*, Jakarta: Gema PKM Indonesia
- Midgley, James, (2005), *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Diperta Depag RI
- Mubyarto dan Kartodirdjo, S, (1988), *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Onny S Prijono & A.M.W Pranarka, (1996), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS
- Randy R Wrihatnolo, 2007, *Managemen Pemberdayaan*, Jakarta: Elex Competindo
- Ritzer, George dan Dougglas J. Goodman, 2003, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media
- Sugiyono, (2007), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*